

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaruh PMA, PMDN, dan belanja pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2014 hingga 2023, kesimpulan sebagai berikut:

1. PMA tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Provinsi Kepulauan Riau.
2. PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Provinsi Kepulauan Riau.
4. Secara simultan PMA, PMDN, dan Belanja Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Provinsi Kepulauan Riau.

5.2 Saran

Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

1. **Peningkatan Infrastruktur Ekonomi dan Transportasi**
Pemerintah Kepri perlu mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang investasi, seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan jaringan transportasi antar-pulau. Infrastruktur yang memadai akan menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya tarik investasi lokal, khususnya di sektor industri pengolahan dan perdagangan.
2. **Penguatan Sektor UMKM dan Industri Kreatif**
Karena PMDN erat kaitannya dengan pelaku usaha domestik, pemerintah perlu mendorong pembiayaan, pendampingan, serta pelatihan manajemen dan digitalisasi bagi UMKM. Hal ini akan menciptakan multiplier effect yang luas terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi daerah.

3. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Sektor Potensial
Optimalisasi sektor strategis seperti industri maritim, pariwisata bahari, dan jasa perdagangan internasional penting dilakukan. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak, penyederhanaan perizinan, serta fasilitas pendukung bagi investor lokal yang berinvestasi pada sektor ini.
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Investasi PMDN akan lebih optimal apabila diiringi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Program vokasi, pelatihan berbasis industri, serta kerjasama antara pemerintah, kampus, dan pelaku usaha perlu diperkuat agar SDM Kepri mampu bersaing dan sesuai kebutuhan pasar kerja.
5. Iklim Investasi yang Kondusif
Pemerintah perlu terus menyederhanakan birokrasi perizinan, meningkatkan transparansi regulasi, dan memperkuat kepastian hukum. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha lokal untuk menanamkan modalnya di Kepri.

